

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pilar fundamental dalam sebuah negara demokrasi, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi politik untuk memilih para pemimpin dan wakilnya. Setiap kontestasi elektoral, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres), menjadi momen krusial yang merefleksikan dinamika kekuasaan, aspirasi publik, dan kesehatan iklim demokrasi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, Pemilihan Presiden tahun 2024 menjadi salah satu kontestasi politik paling dinamis dalam sejarah demokrasi bangsa. Momen ini ditandai oleh tingginya keterlibatan publik dalam diskursus politik, sebuah partisipasi yang seharusnya menjadi energi positif bagi pendewasaan demokrasi. Pilpres 2024 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga barometer penting bagi kualitas demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, dalam diskursus politik menunjukkan adanya kesadaran dan keinginan untuk berkontribusi pada masa depan bangsa. Namun, di balik antusiasme partisipasi ini, terdapat tantangan serius yang mengancam integritas dan kohesi sosial, yaitu fenomena polarisasi politik. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka dan kemampuan masyarakat untuk menerima perbedaan pandangan, namun polarisasi justru mengikis fondasi tersebut dengan memecah belah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling berlawanan dan sulit dipertemukan.

Namun, peningkatan partisipasi ini diiringi oleh sebuah fenomena global yang juga mengakar kuat di Indonesia, yaitu polarisasi politik. Polarisasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat terbagi secara tajam ke dalam dua atau lebih kutub pandangan politik yang tidak hanya berbeda, tetapi juga saling bertentangan secara ekstrem dan sulit untuk dipertemukan. Fenomena ini bukanlah hal baru; pada pilpres sebelumnya, terutama pada tahun 2019, tren polarisasi yang melibatkan isu-isu identitas seperti agama dan suku telah mengental secara signifikan. Polarisasi tidak lagi sebatas perbedaan pilihan atas calon atau partai politik, melainkan telah merasuk lebih dalam menjadi perbedaan cara pandang terhadap isu-isu fundamental, identitas politik kolektif, hingga loyalitas kelompok yang kaku. Secara historis, polarisasi politik di Indonesia seringkali diperparah oleh isu-isu primordial yang mudah memecah belah masyarakat, seperti agama, etnis, atau bahkan asal-usul geografis. Pilpres 2019 menjadi titik krusial di mana polarisasi identitas mencapai puncaknya, menciptakan jurang pemisah yang dalam antar kelompok masyarakat, yang kemudian dikenal dengan istilah "cebong vs kampret" atau "kadrun vs cebong". Kondisi ini tidak serta-merta hilang setelah pemilu usai, melainkan terus berlanjut dan bahkan berpotensi menguat pada Pilpres 2024. Narasi politik yang dibangun tidak lagi hanya berfokus pada program kerja atau visi-misi yang rasional, melainkan juga pada upaya memobilisasi dukungan melalui sentimen emosional dan penegasan identitas kelompok. Bahaya dari polarisasi semacam ini adalah ketika perbedaan politik bertransformasi menjadi kebencian afektif (affective

polarization), di mana individu tidak hanya tidak setuju dengan pandangan lawan, tetapi juga membenci lawan itu sendiri (Iyengar & Westwood, 2015). Ini mengancam fondasi toleransi dan musyawarah dalam kehidupan berdemokrasi.

Pada Pilpres 2024, dinamika ini kembali menguat dengan kehadiran tiga pasangan calon utama yang merepresentasikan spektrum politik yang berbeda: Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Masing-masing pasangan calon membawa narasi, basis massa, dan gaya kampanye yang unik, yang kemudian menjadi bahan bakar bagi menguatnya keterbelahan di tengah masyarakat. Polarisasi tidak lagi sebatas perbedaan pilihan atas calon, melainkan telah merasuk lebih dalam menjadi perbedaan cara pandang, identitas kolektif, hingga loyalitas kelompok yang kaku. Bahaya dari polarisasi semacam ini adalah ketika perbedaan politik bertransformasi menjadi kebencian afektif (*affective polarization*), di mana individu tidak hanya tidak setuju dengan pandangan lawan, tetapi juga membenci lawan itu sendiri (Iyengar & Westwood, 2015).

Di era kontemporer, eskalasi polarisasi politik tidak dapat dipisahkan dari peran media sosial yang telah bertransformasi menjadi ruang utama bagi berlangsungnya komunikasi dan diskursus politik. Kehadiran media sosial, di satu sisi, membuka keran informasi dan partisipasi seluas-luasnya, memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam politik dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya.

Namun, di sisi lain, ia juga menjadi medium yang sangat efektif untuk penyebaran konten yang bersifat tendensius dan memecah belah. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna sering kali menciptakan gelembung informasi (filter bubbles) dan ruang gema (echo chambers), di mana individu secara terus-menerus hanya terpapar pada informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka yang sudah ada (Pariser, 2011). Hal ini secara sistematis memperkuat pandangan politik tertentu, mempertajam sentimen terhadap "lawan", dan pada akhirnya memperburuk iklim polarisasi di tengah masyarakat. Mekanisme kerja algoritma media sosial, yang cenderung memprioritaskan konten yang relevan dengan preferensi pengguna dan riwayat interaksi sebelumnya, secara tidak langsung membatasi paparan individu terhadap perspektif yang berbeda. Akibatnya, pandangan politik seseorang menjadi semakin terkonsolidasi dan terisolasi dari realitas yang lebih luas. Fenomena ini diperparah dengan kecepatan penyebaran informasi, baik yang akurat maupun disinformasi, yang sulit dibendung. Media sosial menjadi lahan subur bagi narasi yang memicu kebencian (hate speech), fitnah, dan hoaks, yang secara efektif digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik dan memperdalam jurang polarisasi (Mulyana, 2014). Generasi muda, sebagai pengguna media sosial paling aktif dan digital native, menjadi subjek yang paling rentan terhadap pengaruh ini, membentuk pandangan politik mereka berdasarkan informasi yang terfragmentasi dan seringkali bias. Kurangnya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring

informasi di media sosial semakin meningkatkan kerentanan ini, menjadikan mereka target empuk bagi kampanye disinformasi yang bertujuan memecah belah.

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, kontestasi politik ini menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah demokrasi Indonesia. Selain karena figur-figur calon yang kuat dan kompetitif, Pilpres kali ini juga ditandai oleh meningkatnya keterlibatan publik dalam diskursus politik, termasuk di kalangan pemilih pemula. Namun, keterlibatan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk partisipasi yang konstruktif. Salah satu gejala yang semakin menonjol adalah munculnya polarisasi politik, suatu keadaan di mana masyarakat terbagi ke dalam dua atau lebih kutub pandangan politik yang saling bertentangan secara ekstrem dan sulit dipertemukan. Dinamika Pilpres 2024 menunjukkan bahwa isu polarisasi tidak hanya terbatas pada tingkatan elite politik, melainkan telah meresap hingga ke akar rumput, memengaruhi interaksi sosial sehari-hari. Pemilih pemula, yang merupakan segmen demografi yang signifikan dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, menjadi kelompok yang sangat menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Mereka adalah generasi yang tumbuh besar di tengah banjir informasi digital dan memiliki karakteristik unik dalam membentuk pandangan politiknya, seringkali lebih mengandalkan media sosial dibandingkan media tradisional atau diskusi tatap muka (Alfaruqy, 2019; Sari, 2023). Hal ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap pembentukan filter bubbles dan echo chambers yang memperkuat polarisasi.

Fenomena polarisasi politik ini telah banyak diperbincangkan dalam konteks nasional, tetapi jarang dilihat secara lebih dekat di tingkat lokal, terutama di kalangan pemilih pemula. Polarisasi tidak sekadar terjadi karena perbedaan pilihan calon presiden, melainkan juga karena perbedaan cara pandang terhadap isu-isu politik, identitas politik, hingga loyalitas terhadap partai. Di kalangan pemilih pemula, perbedaan-perbedaan ini seringkali tidak disikapi secara sehat, melainkan justru menimbulkan ketegangan, penolakan, bahkan konflik dalam lingkup sosial mereka sendiri. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada dampak polarisasi di tingkat makro atau nasional, namun kurang mendalami bagaimana fenomena ini termanifestasi dan memengaruhi kehidupan sosial di tingkat mikro, seperti dalam komunitas lokal, lingkungan pertemanan, atau bahkan keluarga. Padahal, pada level inilah dampak polarisasi terasa paling langsung dan personal. Bagi pemilih pemula, yang masih dalam tahap pembentukan identitas sosial dan politik (Erikson, 1968), pengalaman polarisasi ini dapat meninggalkan jejak yang mendalam pada cara mereka berinteraksi dengan perbedaan di masa depan, membentuk sikap intoleran yang berpotensi merusak kohesi sosial jangka panjang.

Di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai salah satu wilayah yang dekat dengan pusat aktivitas politik dan informasi nasional, gejala polarisasi di kalangan pemilih pemula tampak semakin nyata. Pemilih pemula di wilayah ini berasal dari latar belakang yang beragam—baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya—yang seharusnya menjadi kekuatan dalam demokrasi. Namun dalam

praktiknya, keberagaman ini justru menjadi medan perbedaan pandangan yang tajam, terutama ketika masing-masing individu merasa lebih “benar” dalam posisi politiknya dan menolak berkompromi dengan pihak lain yang berbeda pandangan. Kecamatan Cibinong, dengan karakteristik demografinya yang heterogen dan posisinya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, menjadi representasi ideal untuk mengkaji fenomena polarisasi di tingkat lokal. Dinamika sosial di Cibinong sangat dipengaruhi oleh arus informasi dari ibu kota, menjadikan masyarakatnya, termasuk pemilih pemula, sangat terpapar pada narasi politik nasional (Salim, 2020). Data dari BPS Kabupaten Bogor (2025) menunjukkan Cibinong memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan keragaman etnis serta agama, yang seharusnya menjadi modal sosial. Namun, dalam konteks polarisasi, keberagaman ini justru berpotensi menjadi pemicu ketegangan ketika perbedaan politik diinterpretasikan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok atau keyakinan. Tingginya penetrasi internet di Jawa Barat, dengan dominasi pengguna usia 16-24 tahun (APJII, 2023), semakin memperkuat asumsi bahwa media sosial adalah arena utama pembentukan opini politik di kalangan pemilih pemula Cibinong, yang pada gilirannya memperparah polarisasi.

Pemilih pemula, yang umumnya berusia antara 17 hingga 21 tahun, berada di titik penting dalam proses perkembangan politik mereka. Di satu sisi, mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan dengan sikap politik yang lebih progresif dan terbuka, serta memiliki idealisme yang tinggi. Namun, di sisi lain, mereka sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima melalui media sosial yang

sering kali menyajikan konten yang bersifat tendensius dan cenderung memperkuat pandangan politik tertentu, yang memperburuk polarisasi. Pada usia ini, pemilih pemula sedang aktif mencari dan membentuk identitas diri, termasuk identitas politik. Mereka cenderung lebih mudah terpengaruh oleh narasi yang kuat dan emosional, terutama yang disajikan secara menarik dan visual di media sosial seperti TikTok atau Instagram (Setyoningrum et al., 2022). Kurangnya pengalaman politik, pemahaman mendalam tentang isu-isu kompleks, dan literasi media yang belum matang membuat mereka rentan terhadap manipulasi informasi dan propaganda politik. Akibatnya, mereka cenderung mengadopsi pandangan politik secara dogmatis, tanpa ruang untuk kritik atau dialog konstruktif, dan seringkali terjebak dalam perang opini yang tidak sehat di ranah digital (Nugroho, 2022).

Masalah polarisasi di kalangan pemilih pemula di Cibinong tidak hanya terwujud dalam pilihan politik yang berbeda, tetapi juga dalam cara mereka memaknai lawan politik. Tidak sedikit dari mereka yang mengasosiasikan lawan politik sebagai musuh atau ancaman. Polarisasi semacam ini berbahaya karena memicu sikap eksklusif dan intoleran, yang bertentangan dengan nilai demokrasi itu sendiri. Dalam banyak kasus, keterbelahan ini bahkan menimbulkan friksi di ruang sosial, seperti dalam kelompok pertemanan, lingkungan sekolah, atau bahkan di dalam keluarga. Ketika lawan politik dianggap sebagai musuh, bukan sekadar pihak yang berbeda pendapat, hal ini mengikis fondasi musyawarah dan mufakat yang merupakan ciri khas demokrasi Pancasila. Lingkungan pertemanan yang semula

akrab bisa retak akibat perdebatan sengit, suasana di lingkungan sekolah atau kampus menjadi tidak kondusif karena pengelompokan berdasarkan afiliasi politik, dan bahkan hubungan dalam keluarga bisa tegang karena perbedaan pilihan calon presiden. Ini menunjukkan bahwa polarisasi telah bertransformasi dari sekadar perbedaan preferensi menjadi ancaman nyata terhadap harmoni sosial dan nilai-nilai toleransi, menciptakan keretakan yang sulit diperbaiki (Soekanto, 2005).

Salah satu ciri khas dari polarisasi di kalangan pemilih pemula adalah munculnya afiliasi politik yang kuat dan kaku terhadap salah satu calon atau partai, tanpa ada ruang dialog atau pertimbangan alternatif. Sikap ini menjadikan mereka tidak hanya pendukung pasif, melainkan agen penyebar opini yang keras, baik secara langsung maupun di ruang-ruang interaksi sosial. Tidak jarang, perbedaan pandangan politik ini memunculkan perdebatan tajam yang emosional hingga saling ejek dan sulit diselesaikan secara rasional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa polarisasi politik bukan hanya masalah preferensi pilihan, melainkan telah berkembang menjadi pola pikir dan sikap sosial. Pemilih pemula menjadi subjek yang sangat penting untuk dikaji karena mereka sedang membentuk kesadaran politiknya. Jika kesadaran ini dibangun di atas basis keterbelahan yang tajam, maka ke depan mereka berpotensi melestarikan budaya politik yang intoleran terhadap perbedaan. Dampak jangka panjang dari polarisasi yang terinternalisasi pada generasi muda adalah pembentukan identitas politik yang

kaku. Mereka mungkin tumbuh dengan pandangan bahwa "pihak lain" adalah musuh yang harus dikalahkan, bukan mitra dalam sebuah sistem demokrasi. Hal ini berpotensi menciptakan masyarakat yang terpecah belah secara permanen, menghambat pembangunan konsensus, dan melemahkan fondasi persatuan nasional. Sikap ini, jika tidak diatasi, akan menjadi warisan buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia, di mana perbedaan dianggap sebagai ancaman, bukan kekayaan.

Berbagai bentuk polarisasi yang terjadi di kalangan pemilih pemula di Cibinong bisa diamati dari munculnya eksklusivitas sosial, sikap fanatisme politik, serta melemahnya ruang dialog antar individu. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan terhadap calon presiden bahkan memicu tindakan saling berdebat dengan tensi emosi tinggi, saling ejek antar pilihan paslon, atau menimbulkan ketegangan dalam aktivitas komunitas. Ini menjadi indikasi awal dari terjadinya disrupsi sosial akibat polarisasi yang belum tentu disadari oleh para pelakunya sendiri. Observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa manifestasi polarisasi di Cibinong tidak hanya terbatas pada ranah daring, tetapi juga merambah ke interaksi tatap muka. Lingkungan sosial seperti sekolah, tempat nongkrong, atau bahkan kegiatan keagamaan, dapat menjadi arena di mana perbedaan politik memicu konflik. Kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari perilaku ini, serta minimnya intervensi untuk memfasilitasi dialog sehat, menjadikan masalah polarisasi semakin mendesak untuk diteliti dan diatasi. Disrupsi sosial ini dapat terlihat dari

berkurangnya kegiatan kolaboratif lintas kelompok, menurunnya kepercayaan antarwarga, hingga potensi konflik fisik yang dipicu oleh sentimen politik.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti lebih dalam, terutama untuk memahami bagaimana proses polarisasi politik terbentuk di kalangan pemilih pemula secara sosial dan kultural. Tidak cukup hanya memetakan preferensi politik mereka, tetapi juga perlu ditelusuri bagaimana mereka memaknai perbedaan politik, bagaimana mereka membentuk identitas politik, dan bagaimana mereka merespons lawan pandangannya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini mencoba menggali dinamika polarisasi politik di kalangan pemilih pemula di Kecamatan Cibinong secara mendalam, melalui pendekatan kualitatif. Tujuannya bukan untuk mengukur seberapa banyak polarisasi terjadi, tetapi untuk memahami bagaimana polarisasi tersebut terbentuk, dialami, dan diinternalisasi oleh para pemilih muda. Dengan memahami pengalaman subjektif mereka, diharapkan dapat ditemukan pola-pola interaksi sosial yang mengarah pada keterbelahan, serta bagaimana hal itu dapat diminimalisasi dalam konteks lokal.

Dengan menempatkan pemilih pemula sebagai subjek utama, dan polarisasi politik sebagai gejala sosial yang semakin berkembang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memahami budaya politik kontemporer, sekaligus memberikan masukan praktis untuk pendidikan politik,

kampanye pemilu yang lebih sehat, serta penguatan toleransi dalam keberagaman pandangan politik di tingkat akar rumput.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana polarisasi politik terjadi di kalangan pemilih pemula di Kecamatan Cibinong dalam konteks Pemilihan Presiden 2024? Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menggali: bagaimana pemilih pemula memaknai perbedaan pilihan politik di lingkungan sosial mereka, dan bagaimana bentuk-bentuk keterbelahan itu termanifestasi dalam hubungan sehari-hari dengan keluarga, teman, atau komunitas sosial lainnya. Dengan memahami akar dan dinamika dari polarisasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena politik kontemporer di tingkat akar rumput.

Fenomena polarisasi politik yang terjadi di kalangan pemilih pemula dalam Pemilihan Presiden 2024 telah menjadi salah satu isu sosial-politik yang menonjol di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Cibinong. Polarisasi ini tampak dalam bentuk keterbelahan pandangan yang tajam antarindividu, sikap eksklusif terhadap kelompok lawan politik, serta minimnya ruang dialog antarpemilih kandidat. Pemilih pemula, yang notabene merupakan generasi muda yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu, justru menunjukkan kecenderungan untuk berafiliasi

secara kaku terhadap calon tertentu, sehingga perbedaan pilihan politik sering berujung pada ketegangan dalam relasi sosial mereka sehari-hari.

Masalah yang muncul bukan semata-mata pada pilihan politik yang berbeda, tetapi pada sikap dan cara pemilih pemula merespons perbedaan tersebut. Dalam banyak kasus, perbedaan pandangan terhadap calon presiden telah berkembang menjadi bentuk fanatisme politik, yang membuat individu memaknai lawan politik sebagai ancaman atau musuh, bukan sekadar pihak yang berbeda pendapat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana polarisasi terbentuk di lingkungan sosial pemilih pemula, bagaimana mereka membentuk identitas politik, serta bagaimana interaksi sosial mereka terpengaruh oleh keterbelahan tersebut.

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa terjadi polarisasi politik di kalangan pemilih pemula di kecamatan cibinong?
2. Bagaimana dampak polarisasi politik yang terjadi di kalangan pemilih pemula di kecamatan cibinong?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Praktis

1. Mengkaji bagaimana terjadinya polarisasi politik didalam masyarakat kecamatan cibinong

2. Mengkaji fragmentasi sebagai akibat dari terjadinya sebuah polarisasi politik
3. Meneliti respon pemilih pemula terhadap perbedaan pandangan politik dalam interaksi sosial mereka.

1.3.2 Tujuan Akademis

1. Memberikan kontribusi pada studi pola tentang perilaku pemilih khususnya kalangan pemilih pemula.
2. Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu politik dalam studi tentang polarisasi dan fragmentasi dalam pemilihan presiden akibat dari media sosial

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

Polarisasi yang terjadi di kalangan pemilih pemula akibat perbedaan pandangan politik.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada lembaga pendidikan dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dialog politik sehat di kalangan pemilih pemula.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi ke dalam 5 (lima) BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka, peneliti menguraikan hasil studi literatur penelitian terdahulu yang orang lain lakukan dan relevan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Kemudian, membandingkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu tersebut. Lalu dalam bab ini, juga membahas dan menguraikan teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian sebagai pisau analisa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti membahas mengenai pendekatan penelitian yaitu dengan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi literatur.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan gambaran umum profil kecamatan cibinong serta jumlah dan karakteristik informan serta penjelasan latar sosial yang relevan dengan isu polarisasi

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini, menyimpulkan hasil penelitian yang telah diteliti dan saran-saran untuk penelitian di masa yang akan datang.

